BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan peran serta dalam suatu kegiatan atau bisa dikatakan keikutsertaan atau peran serta. Wazir juga telah mengemukakan bahwa partisipasi dapat bermakna sebagai suatu keterlibatan seseorang secara sadar dalam suatu interkasi sosial pada situasi tertentu. Sedangkan menurut Isbandi, partisipasi merupakan proses keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pengambilan dan pemilihan keputusan tentang alternatif solusi dalam penanganan masalah, serta keikutsertaan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen mengemukakan bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari seluruh masyarakat pada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Dari penjelasan tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi merupakan suatu kegiatan atau keterlibatan secara aktif dari seseorang atau kelompok (masyarakat) untuk berkontribusi secara sukarela dalam program

pembangunan atau pengembangan dan berperan pada setiap tahap-tahap partisipasi tersebut, yakni mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap terakhir yaitu evaluasi.[10]

Dalam Bahasa Inggris, masyarakat dikenal dengan "*society*" yang pengertiannya mencakup perubahan sosial, interaksi sosial, serta rasa kebersamaan.

Menurut Mac Iver &Page, masyarakat merupakan sistem dari tata cara dan kebiasaan, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok serta penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Sedangkan menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama jadi mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggapnya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.[11] Partisipasi masyarakat menurut Isbandi merupakan peran serta atau keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses identifikasi masalah dan potensi yang terdapat di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk penaganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi suatu masalah, serta keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi terhadap segala perubahan yang terjadi.

Pentingnya suatu partisipasi masyarakat juga dikemukakakn oleh Conyers, yang pertama, partisipasi merupakan suatu alat yang

[10] Siti Hajar et.al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi...*, hlm. 30
[11] Yusnedi Achmad, *Sosiologi Politik,* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012,) hlm.7

berguna untuk mendapat informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai suatu proyek atau program pembangunan jika merasa terlibat dalam proses persiapan serta perencanaan, karena mereka yang lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki pada proyek-proyek tersebut. Ketiga, keterlibatan masyarakat merupakan bentuk hak demokrasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi masyarakat sendiri.

2. Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat

Dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department For International development (DFID) Seumampow tertuang prinsip-prinsi partisipasi sebagai berikut[12]:

a. Cakupan

Hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan akan berdampak pada semua orang atau perwakilan dari semua kelompok.

b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*)

Setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan, ketrampilan, serta prakarsa serta memiliki hak untuk menggunakan prakarsa tersebut untuk berperan dan terlibat

[12] Siti Hajar et.al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi...*, hlm. 31

dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa ada perhitungan jenjang maupun struktur dari masing-masing pihak.

c. Transparansi

Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi serta iklim komunikasi yang terbuka dan kondusif agar dapat menciptakan dialog.

d. Kesetaraan Kewenangan (*sharing Power/ Equal Powership*)

Adanya pendistribusian kewenangan serta kekuasaan untuk menghindari adanya dominasi dalam berbagai pihak yang terlibat.

e. Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*)

Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas pada setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keikutsertaannya dalam proses pengambilan keputusan serta langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Keterlibatan semua pihak tidak pernah lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, maka dalam proses keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan terjadi suatu proses saling belajar serta saling memberdayakan satu sama lain.

Menurut Adams seperti yang dikutip oleh Ulfi[13], pemberdayaan sendiri merupakan cara atau metode yang digunakan individu, kelompok, atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu untuk bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka.

g. Kerjasama

Perlu adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling *sharing* (berbagi) kelebihan guna meminimalisir segala kelemahan yang ada berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia pada khususnya.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers dikutip oleh Siti Hajar, adalah sebagai berikut[14]: pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya suatu program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena merekalah yang lebih tahu seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek-proyek tersebut. Ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila

[13] Ulfi Putra Sany, Jurnal: "*Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*" Vol 39 No. 1 2019

[14] Siti Hajar et.al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi...*, hlm. 32

masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia. Et. al yang dikutip oleh Siti Hajar, ada beberapa kegiatan yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan atau pembangunan, yakni partisipasi dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil (*output*) dari pembangunan.[15]

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Dalam program pembangunan yang berbasis masyarakat sebagai pengelola, termasuk pemanfaatan dari sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya, selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa serta kurang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan masyarakat banyak. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dan pengembangan perlu untuk ditumbuhkembangkan melalui dibentuknya forum yang didalamnya memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan mengenai program-program pembangunan di wilayah setempat (lokal).

[15] *Ibid,* hlm. 30

Dalam partisipasi pengambilan keputusan harus menghasilkan kata sepakat antar semua pihak yang terlibat. Dimana nantinya program yang akan dijalankan tidak akan merugikan maupun menguntungkan sebagian pihak saja. Dalam Al-Qur'an Q.S. Asy-Syura:38 sudah dijelaskan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan menlaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."* (Q.S. Asy-Syura:38)[16]

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan ini sering diartikan sebagai partisipasi masyarakat yang umumnya lebih miskin untuk secara sukarela menyumbangkan tenaga mereka dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pada pihak lapisan atasnya, yang umumnya terdiri dari orang-orang kaya dalam banyak hal lebih banyak mendapatkan manfaat bersih dari hasil pembangunan, dan tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.

Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pengembangan harus berarti

[16] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan,* Qs. As-Syura (42): 38, (Al-Huda: 2005,) hlm. 488

sebagai pemerataan sumbangan masyarakat baik berupa tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c. Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program proyek pembangunan diperlukan untuk memperoleh umpan balik mengenai masalah-masalah dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersangkutan. Pengumpulan informasi terkait dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat bersangkutan sangat diperlukan dalam hal partisipasi masyarakat.

d. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi bentuk ini merupakan unsur terpenting yang seringkali terlupakan. Jika dikaji lebih lanjut, pembangunan memiliki tujuan penting dalam memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak, tepatnya pada pemerataan hasil pembangunan yang akan datang. Pemerataan hasil pembagunan akan merangsang masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam proyek maupun program pembangunan selanjutnya.

Kegiatan partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata hasil dari pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dalam ilmu

ekonomi maupun ilmu-ilmu yang lain tidaklah luput dari kajian Islam, hal ini memiliki tujuan agar manusia selalu berada dijalan yang lurus. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan yang juga harus memiliki nilai ibadah.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur."*(Q.S. Al-A'raf:10)[17]

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah telah mengatur segala bumi dan isinya untuk dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melalui potensi sumber daya alam yang ada, sebagai manusia kita harus bisa memenuhi segala kebutuhan kita demi kesejahteraan hidup dengan bijaksana dan harus diimbangi dengan bertawakal kepada Allah.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: "*Dan Kami membuat siang untuk mencari mata penghidupan,*" (Q.S. An-Naba':11)[18]

Dalam Q.S An-Naba juga dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja keras demi kesejahteraan hidup. Dalam hal ini juga harus mematuhi etika serta norma yang ada, serta tetap diselaraskan dengan syariat Islam.

[17] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an...,* Qs. Al-A'raf (7): 10, hlm. 152
[18] Basharat Ahmad, *Anwarul Qur'an,* (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyah, 2017,) hlm. 12

Kemudian Dusseldorp seperti yang dikutip oleh Siti Hajar juga mengidentifikasi beragam bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan setiap masyarakat bisa berupa[19]:

a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat yang telah dibentuk. Pembentukan kelompok ini juga akan mempermudah akses masuknya informasi dari pemerintahan pusat maupun daerah kepada masyarakat.
b. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok. Keikutsertaan masyarakat yang tergabung dalam kelompok juga harus mengikuti kegiatan diskusi yang berguna untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam kegiatan-kegiatan proyek usaha guna keberlangsungan proyek tersebut.
c. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang bertujuan menggerakan partisipasi masyarakat lainnya. Pembentukan organisasi berbasis masyarakat sekitar juga dapat menjadi salah satu cara melibatkan diri secara langsung terhadap keberlangsungan wisata yang ada dan sedang dikembangkan.
d. Penggerakan sumber daya masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai pengelola proyek maupun sebagai pelaku bisnis juga dapat dilakukan dan terus dikembangkan.

[19] Siti Hajar et.al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi...*, hlm. 34

e. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Khususnya bagi para pengelola usaha, pengambilan keputusan yang tepat berguna untuk kemajuan usaha.

f. Adanya proses pemanfaatan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. Dengan adanya usaha yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang diterima bagi masyarakat dengan memanfaatkan hasil-hasil dari pemberdayaan ekonomi.

Menurut Abu Huraerah dikutip oleh Fatimah Alfiani, adapun bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksud sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi[20]:

a. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran, yang diberikan oleh partisipan dalam sebuah pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikirannya.

b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.

c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan

[20] Fatimah Alfiani, Skripsi: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Grogol, Margodadi, Seyegan, Sleman, D.I. Yogyakarta*" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 18-19

bagi orang lain berupa uang, barang, memberikan makanan ataupun minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa), dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan progam maupun proyek yang ada.

d. Partisipasi ketrampilan atau kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja.

e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya mengikuti arisan, koperasi, takziah, kondangan, dan lain sebagainya.

f. Partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap serta memberikan tanggapan terhadap informasi baik dengan maksud menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan dalam arti menerima maupun menolak pendapat dengan syarat. Meskipun hanya dalam bentuk mengiyakan itu merupakan partisipasi yang patut dihargai.

4. Tipe Partisipasi

Bass et al, dikutip oleh Siti Hajar mengidentifikasi adanya tujuh tipe karakteristik dari partisipasi, antara lain[21]:

a. Partisipasi Pasif/ Manipulatif

[21] Siti Hajar et.al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi...*, hlm. 35

1) Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi
2) Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan dari masyarakat
3) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.

Menurut A. Oktami Dewi, partisipasi pada tingkat ini keanggotaannya bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.

b. Partisipasi Informatif
   1) Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian
   2) Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian
   3) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat
c. Partisipasi Konsultatif
   1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
   2) Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya
   3) Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
   4) Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan
   5) Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti
d. Partisipasi Insentif

1) Masyarakat memberikan korbanan/ jasanya guna memperoleh imbalan atau upah
2) Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen lain
3) Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif dihentikan

e. Partisipasi Fungsional
   1) Pembentukan kelompok masyarakat
   2) Pembentukan kelompok setelah ada keputusan utama yang yang disepakati
   3) Awalnya masyarakat bergantung pada pihak luar, tapi secara bertahap mulai mandiri

f. Partisipasi Interaktif
   1) Masyarakat berperan dalam analisis perencanaan kegiatan dan pembentukan kelembagaan
   2) Cenderung melibatkan metode intedisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar
   3) Masyarakat berperan dalam keseluruhan kegiatan

g. Self Mobilization (mandiri)
   1) Masyarakat mengambil inisiatif sendiri
   2) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain

3) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Menurut Wilcox seperti yang dikutip oleh Sri Handini[22], mengemukakan 5 tingkatan atau tahapan partisipasi, yaitu:

a. Memberikan informasi (*Information*)
b. Konsultasi (*consultation*), yakni menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut
c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
d. Bertindak bersama (*acting together),* dalam arti tidak hanya sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga ikut terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya
e. Memberikan dukungan (*supporting independen community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan

5. Faktor Pendukung Partisipasi

Menurut Abe dikutip oleh Siti Hajar[23], dalam melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak, yang

[22] Sri Handini, Sukesi, & Hartati Kanty Astuty, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019,) hlm. 29

pertama, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki rakyat. Yang kedua, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Mendukung pernyataan Abe, Dorojatun yang dikutip oleh Siti Hajar[24], berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program, yakni timbulnya partisipasi merupakan suatu ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didasari oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) kemauan, 2) kemampuan, 3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Menurut Slamet seperti yang dikutip oleh Sri Handini[25], juga menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi. Dalam kenyataan banyak sekali program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering

[23] Siti Hajar et.al., *Pemberdayaan Dan Partisipasi...,* hlm. 35
[24] Sri Handini, *Pemberdayaan Masyarakat...,* hlm. 36
[25] *Ibid,* hlm. 32

dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah:

1) Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai dijajaran birokrasi yang paling bawah.
2) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
3) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan buatan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/ perlengkapan penunjangnya.
5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut[26]:

1) Sikap untuk meninggalkan segala nilai yang menghambat pembangunan dari segala segi
2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri
4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan
5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya

c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Tentang hal ini, adanya kesempatan yang diberikan sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk

[26] *Ibid,* hlm. 36-37

berpartisipasi. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah[27]:

1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya)
2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki
3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal

6. Tokoh Masyarakat

Didalam kehidupan bermasyarakat terdapat peran tokoh tertentu yang menjadi penggerak. Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh, dan ada yang bersifat formal maupun informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat serta dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural seperti camat dan lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena dipandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan dapat mengayomi masyarakat.

[27] *Ibid,* hlm. 34-35

Menurut Miriam Budiarji dikutip oleh Riska Porawouw[28], pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya. Tentu saja ketokohan seseorang dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya *paternalistik*, dimana peran seorang tokoh atau elite dalam masyarakat desa sangatlah dominan dalam hal pengambilan kebijakan pada aras desa. Sementara itu, yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintah yang ditujukan dengan adanya kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama adalah tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan. Elit ormas merupakan tokoh dalam organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa. Elit intelektual adalah ditokohkan karena kecerdasan dan kepandaiannya atau karena pendidikannya, sedangkan mereka dapat berprofesi sebagai guru, pegawai/ pejabat pemerintahan, sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat

[28] Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)*, Jurnal Policito, 2016, hlm. 6-7

dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan.[29]

B. Pengembangan Wisata

1. Pengertian Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari Bahasa Sangsekerta, pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu "*pari*" dan "*wisata*". Pari berarti banyak, berkali-kali atau berputar, sedangkan wisata bermakna bepergian atau perjalanan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa pariwisata merupakan kegiatan atau perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berkeliling.

Pariwisata menurut Prof. Hunziker dan Kraft dikutip oleh M. Liga[30], merupakan keseluruhan hubungan serta gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang timbul dari adanya perjalanan dan tinggalnya orang asing, dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal atau menetap dan juga tidak ada hubungan dengan kegiatan mencari nafkah.

Dalam PP No. 18 Tahun 1994, pariwisata alam didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kaitan dengan alam, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

---

[29] *Ibid,* hlm. 7
[30] Liga Suryadana, *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisataan...*, hlm. 46-49

Menurut Departemen Kehutanan dikutip oleh Adib munawar[31], wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sedangkan pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam dan usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pengertian dari wisata alam sering berbeda-beda menurut para ahli ataupun sumber dan seringkali mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian wisata alam menurut Fandeli dan Mukhlison adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami, serta memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat.

Secara konsepsi, wisata alam dapat dilihat sebagai pemanfaatan dan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan di wilayah yang terbentuk secara alami yang ditujukan untuk mendukung perlindungan dan konservasi alam dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat. Secara de facto kegiatan wisata alam merupakan aktifitas perjalanan, pengamatan, dan proses mendokumentasikan wilayah-wilayah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan mempertahankan kaidah alam dimana

[31] Adib Munawar Nawir, *Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan; Pemanfaatan Dan Pengembangan*, (Makasar: Inti Meditama, 2019), hlm. 9

tujuannya tidak hanya menikmati keindahan alam tapi juga ada unsur pendidikan lingkungan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan wisata alam.[32]

Konsep wisata alam mempunyai dua prinsip utama yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengelola kawasan hutan untuk kegiatan wisata, yaitu:

a. Prinsip perlindungan alam

Yakni prinsip berasaskan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hal ini merupakan prinsip yang penting dalam kegiatan wisata alam, karena keberlanjutan kegiatan wisata alam sangat ditentukan oleh kelestarian alam itu sendiri.

b. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Yaitu prinsip mengutamakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pembangunan wisata alam. Pembangunan ekonomi kerakyatan dapat menjadi pondasi landasan pengembangan untuk merumuskan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penciptaan lapangan kerja setempat, pengembangan ekonomi kerakyatan serta adanya peningkatan pendapatan lokal maupun regional secara adil, dapat dirumuskan sebagai strategi pengembangan ekowisata yang menentukan

[32] *Ibid,* hlm. 9-10

kewilayahannya berlandaskan ekosistem dan kesatuan pengelolaannya.[33]

2. Pengembangan Pariwisata

Menurut Patusuri seperti yang dikutip oleh I Made Suniastha, pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan guna memajukan, memperbaiki, serta meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan. Selain itu, keberadaan wisata dapat memberikan manfaat bagi wisatawan, industri pariwisata (investor), pemerintah, serta masyarakat lokal.

Terdapat 6 tahap pengembangan pariwisata yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda seperti yang dikemukakan Butler[34]:

a. Tahap eksplorasi, pertumbuhan spontan dan penjajakan
b. Tahap keterlibatan (*involvement*)
c. Tahap pengembangan dan pembangunan (*development*)
d. Tahap konsolidasi (*consolidation*)
e. Tahap kestabilan (*stagnation*)
f. Tahap penurunan kualitas (*decline*) dan kelahiran baru (*rejuvenation*).

Selain itu, terdapat 3 aspek penting dalam upaya pengembangan wisata alam dalam kawasan hutan, yaitu:

[33] *Ibid*, hlm. 10
[34] I Made Suniastha Amerta, *Pengembangan Pariwisata Alternatif*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 13-16

a. Tersedianya sarana dan infrastruktur yang memungkinkan seorang wisatawan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Aksi vandalism yang tidak bertanggungjawab bisa dapat dicegah apabila terdapat edukasi dan pengawasan yang baik pada suatu kawasan wisata.
b. Memberikan pendidikan semua orang untuk ikut melestarikan hutan yang dimaksud, baik pengunjung, pemilik usaha, tukang parkir, penjual cindera mata, pemilik restauran, sampai dengan masyarakat di sekitar hutan.
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitaran obyek wisata agar tidak terjadi kecemburuan sosial dengan pelaku wisata dan tidak mengganggu kawasan wisata alam sekitar hutan. Gangguan kriminalitas dapat terjadi pada objek wisata yang terletak jauh dari keramaian dan konsep pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Produk wisata yang baik harus dapat mendatangkan wisatawan sebanyak banyaknya, menahan mereka dalam waktu yang lama, serta memberi kepuasan kepada wisatawannya. Menurut Soekadijo dikutip oleh Adib Munawar, untuk mencapai hasil tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu[35]:

a. Objek wisata alam dalam keadaan baik dan secara alami terjaga keasliannya dan tidak rusak atau cacat oleh tangan-tangan yang

[35] Adib Munawar, *Potensi Wisata Alam...*, hlm. 11

tidak bertanggungjawab. Untuk dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung, obyek wisata harus ada dalam keadaan terjaga dengan baik, demikian pula apabila terdapat destinasi penunjang berupa kegiatan seperti tarian dan upacara, maupun peninggalan sejarah yang berupa objek, seperti candi, keris, dan sebagainya.

b. Jika terdapat atraksi wisata itu harus disajikan dihadapan wisatawan, maka cara penyajiannya harus tepat. Apalagi jika atraksi wisata tersebut melibatkan flora dan satwa yang ada di wilayah wisata alam. Atraksi wisata boleh dikatakan berhasil kalau menimbulkan kesan kepada wisatawan, tanpa terjadi eksploitasi dan penyiksaan terhadap satwa yang ikut serta dalam atraksi wisata itu sendiri, akan tetapi juga pada komitmen dan kepedulian terhadap alam untuk menyakinkan pengunjung atau wisatawan.

c. Objek wisata terintegrasi dengan syarat-syarat pariwisata lainnya, yaitu jasa pelayanan, transportasi dan aktualisasi. Dengan membangun objek wisata saja wisatawan belum tentu datang. Objek wisata itu harus diintegrasikan dengan syarat-syarat pariwisata lainnya, yaitu jasa pelayanan, transportasi dan aktualisasi.

d. Dapat menahan wisatawan di tempat atraksi dalam waktu yang cukup lama. Tujuan pembangunan pariwisata adalah tidak hanya

mendatangkan wisatwan sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga menahan mereka selama mungkin. Dengan asumsi bahwa akan semakin besar keuntungan yang diharapkan dari kehadiran mereka, yakni dengan semakin lamanya wisatawan dapat bertahan di suatu objek wisata maka akan semakin bertambah pula perputaran uang yang terjadi.

Menurut Yoeti dikutip oleh Adib Munawar[36], perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan di masa mendatang dengan mengelola sumber daya dan potensi yang ada. Suatu perencanaan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan dan juga proses yang dilakukan untuk menacapai suatu tujuan yang telah ditentukan untuk masa depan yang lebih baik dari masa sekarang dengan mengelola dan mengoptimalkan potensi atau sumber daya yang ada sebaik mungkin.

Dalam suatu konsep perencanaan wisata, para pengembang harus memperhatikan semua aspek pendukung wisata, karena pariwisata merupakan kegiatan yang berlangsung di atas permukaaan tanah dan menyangkut semua bentuk-bentuk unsur alam, air, udara, kehidupan liar didalamnya. Selain faktor alam terdapat pula faktor-faktor lainnya yaitu faktor buatan manusia seperti pasar, transportasi dan karakteristik masyarakat setempat.

[36] *Ibid,* hlm. 12

Menurut Damanik dikutip oleh Adib Munawar, dalam menganalisis pengembangan produk wisata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Riset pasar (*market research*), meliputi: luas cakupan area, kependudukan dan kondisi sosial ekonomi, kompetitor sejenis disekitar, faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan wisata di masa datang.
b. Pengamatan lokasi (*site investigation*), meliputi: jarak pencapaian dari dan ke lokasi, lingkungan sekitar, ketersediaan infrastruktur, pengembangan lingkungan sekitar, kendala dan biaya, dampak lingkungan dan sosial ekonomi.
c. Program, meliputi: penetapan waktu alternatif objek wisata, persyaratan kebutuhan fasilitas, estimasi biaya (modal dan operasional), manajemen pengelolaan dan keuangan.
d. Perencanaan fisik, meliputi: traffic, sirkulasi dan manajemen transportasi pada saat puncak keramaian terjadi, diversifikasi atraksi wisata dan kegiatan yang lebih variatif.[37]

3. Dampak Pengembangan Pariwisata

Menurut Soemarwoto seperti yang dikutip oleh Tri Weda[38], menjelaskan bahwa dampak merupakan perubahan yang terjadi di dalam suatu lingkup lingkungan akibat adanya perbuatan manusia.

[37] *Ibid*, hlm. 13

[38] Tri Weda Raharjo & Herrukmi Septa Rinawati, *Penguatan Strategi Pemasaran dan Daya Saing UMKM Berbasis Kemitraan Desa Wisata*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019,) hlm. 16

Untuk dapat menilai terjadinya dampak, perlu adanya suatu acuan yakni kondisi lingkungan sebelum adanya aktivitas. Oleh karena itu dampak lingkungan adalah selisih antara keadaan lingkungan dengan proyek. Dampak dari suatu kegiatan pembangunan berpengaruh terhadap aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Lenner Mathieson & Wall seperti yang dikutip oleh Tri Weda[39], menjelaskan dimana pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek yang telah disebutkan diatas. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang

[39] *Ibid,* hlm. 17

memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

4. Dampak Ekonomi Pariwisata

Menurut Yoeti seperti yang dikutip oleh Tri Weda[40], menjelaskan ada beberapa faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara yang disebabkan akibat adanya kegiatan pariwisata, diantaranya adalah:

a. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata sehingga memungkinkan orang-orang melakukan aktivitas ekonominya dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu wilayah negara tertentu, maupun dalam kawasan internasional pun.
b. Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata
c. Meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran
d. Meningkatkan permintaan terhadap *handicraft, souvenir goods, art painting,* dan lain sebagainya
e. Memperluas barang-barang lokal untuk lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman
f. Meningkatkan perolehan devisa negara sehingga mengurangi beban defisit neraca pembayaran

[40] *Ibid,* hlm. 21

g. Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional
h. Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan
i. Mempercepat perputaran perekonomian pada negara-negara penerima kunjungan wisatawan (*Tourist Receiving Countries*)
j. Dampak penggandaan yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan, sehingga memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah tujuan wisata (DTW) yang dikunjungi wisatawan.

Menurut Antara seperti yang dikutip oleh I Gusti Bagus[41], dari perspektif ekonomi dampak positif dari kegiatan pariwisata yaitu: (1) menjadi pasar potensial bagi produk barang dan jasa masyarakat setempat, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak langsung dengan jasa pariwisata, (3) memperluas penciptaan kesempatan kerja, baik pada sektor-sektor yang terkait langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, maupun pada sektor-sektor yang tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, jasa-jasa lain dan sebagainya, (4) sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan (5) merangsang kreatifitas seniman baik seniman

[41] I Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata,* (Yogyakarta: Deepublish, 2014,) hlm. 144

pengrajin industri kecil maupun seniman tabuh dan tayang diperuntukan konsumsi wisatawan.

Selain dampak positif, menurut Robert Cristie Mill seperti yang dikutip oleh Tri Weda[42] adanya pariwisata juga memberikan beberapa dampak yang negatif pada sektor ekonomi masyarakat, antara lain:

a. Meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana
b. Meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan-bahan pokok
c. Peningkatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik dan turun
d. Mengalirnya uang keluar negeri karena konsumen menuntut barang-barang impor untuk bahan konsumsi tertentu

C. Kajian Penelitian Terdahulu

Dengan adanya kajian penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai bahan kepustakaan dan referensi serta pertimbangan terhadap sebuah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eko Riyani. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata Air Terjun Jumog di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Pada

[42] Tri Weda Raharjo, *Penguatan Strategi Pemasaran...*, hlm. 20

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dilihat dari adanya rapat pembahasan program kegiatan pada objek wisata, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dilihat dari kegiatan gotong royong masyarakat secara sukarela, partisipasi dalam pemantauan evaluasi dilihat melalui study banding yang dilakukan pengelola, partisipasi pemanfaatan hasil terhadap peningkatan output.[43]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ariz Nisrina. Dimana tujuan dari penelitian ini menjelaskan bentuk partisipasi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Dam Margotirto dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masyarakat serta solusi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini bentuk partisipasi meliputi sumbangan dana, sumbangan tenaga, dan juga sumbangan harta benda yang diberikan masyarakat. Partisipasi yang dilakukan dalam tahap perencanaan berada di tingkat paling tinggi, kemudian pada tahap pelaksanaan berada di tingkat sedang,

[43] Eko Riyani, Skripsi: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Air Terjun Jumog dan Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Studi di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar*" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)

pada tahap pemanfaatan hasil berada di tingkat terendah, dan tahap evaluasi berada di tingkat paling tinggi. [44]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rifqy Widayuni. Dimana tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata serta mendiskripsikan tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini partisipasi dalam pengembangan desa wisata melalui kelompok sadar wisata dengan kegiatan musyawarah gotong royong dan sumbangan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dimulai dari partisipasi dalam bentuk pikiran, tenaga, uang atau harta benda. Dalam bentuk pikiran dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dilakukan dengan gotong royong rutin. Dan partisipasi masyarakat melalui uang dilakukan dengan sumbangan uang, barang, maupun makanan. Sedangkan untuk tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata sudah berjalan baik dilihat dari kekompakan aparat desa dan masyarakat dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, bertindak bersama, dan memberikan dukungan.[45]

---

[44] Ariz Nisrina, Skripsi: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Objek Wisata Dam Margotirto di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)

[45] Rifqy Widayuni, Skripsi: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yayang Septian Sari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata di Pulau Pahawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat memberdayakan penyedia jasa pariwisata yang awalnya sekedar hobi membudidayakan terumbu karang kemudian menjadi tempat wisata bawah air sebagai foto-foto yang bagus dan menjual bagi warga sekitar tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh warga di pulau pahawang yaitu bantuan dari pemerintah yang tidak tersentuh baik materil maupun fasilitas tambahan yang dibutuhkan. Partisipasi masyarakat Pulau Pahawang juga sudah cukup baik, mereka telah memberikan sarana dan prasarana yang ada di Pulau Pahawang.[46]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Agung N. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Jembangan Kabupaten Kebumen serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat muncul dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan Desa Wisata seperti gotong royong, meramaikan dengan berdagang, membantu kebersihan, menjadi pekerja, menjaga keamanan. Masyarakat

[46] Yayang Septian Sari, Skripsi: "*Partisipasi masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran"* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Desa Jembangan melaksanakan pertisipasi dalam pembangunan dengan ikut memberi masukan dalam proses pembangunan, menerima imbalan dan ikut menikmati hasilnya. Dalam hal pembangunan Desa Wisata seluruh warga masyarakat selalu dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata. Tidak hanya itu, pihak pengelola sendiri juga memberikan partisipasinya dengan selalu mengadakan pengembangan secara berkala yakni setiap tahun selalu diadakan pengembangan. Bahkan pemerintah desa juga mengadakan kerjasama dengan pihak investor demi terbentuknya desa wisata walau dilatar belakangi oleh ketidakmampuan desa dalam pembiayaan pembentukan Desa Wisata Jembangan. Adapun faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi adalah adanya rasa solidaritas karena memiliki tujuan yang sama.[47]

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pariwisata dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Pantai Depok. Fokus utama penelitian ini menilai tingkat pertisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan dibentuknya Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok yang merupakan wadah organisasi masyarakat yang ada di Dusun Depok untuk mewadahi pengelolaan wisata Pantai Depok yang melakukan berbagai

[47] Aditya Agung Nugroho, Skripsi: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Studi: di Desa Wisata Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen"* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019)

kegiatan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat di kawasan wisata Pantai Depok terlihat jelas setiap hari, karea dari sinilah keuntungan didapat oleh masyarakat dari kegiatan pariwisata, semua pedagang yang berjualan di kawasan wisata Pantai depok merupakan masyarakat lokal yang berada di Dusun Depok.[48]

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nikita Amalia VGA, Andriani Kusumawati, & Luchman Hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atraksi wisata yang ada di Desa Tulungrejo serta menganalisis bentuk partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo terhadap pengembangan desa wisata cukup tinggi. Hampir semua masyarakat telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata di Desa Tulungrejo. Masyarakat telah mengerti dan telah sadar wisata dalam ikut serta menciptakan desa wisata yang layak dan siap bersaing di industri pariwisata. Masyarakat Desa Tulungrejo memberikan partisipasinya lebih dari satu bentuk partisipasi, partisipasi tenaga dan juga partisipasi harta benda misalnya. Pengembangan desa wisata di Desa Tulungrejo menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bagi masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, adanya tambahan pendapatan bagi petani, serta meningkatnya nilai jual buah apel.[49]

---

[48] Ahmad Nawawi, Jurnal: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis*" Vol. 5 No.2 Agustus 2013.

[49] Nikita Amalia VGA, Andriani Kusumawati, & Luchman Hakim, Jurnal: "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu*" Vol. 61 No.3 Agustus 2018.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati & Suroso. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata Watu Parunnu di Desa Lainjanji Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua yakni partisipasi non materi dan partisipasi materi. Untuk partisipasi masyarakat dalam non materi seperti partisipasi buah pikir berada di kategori sangat rendah dibanding partisipasi masyarakat di bidang materi. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Watu Parunu di Desa Laijanji Kecamatan Wula Kabupaten Sumba Timur kurang maksimal. Banyak pihak yang belum terlibat secara penuh dalam kegiatan pengembangan wisata ini.[50]

Table 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Riyani	"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Air Terjun Jumog dan Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Studi di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendekripsikan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap partisipasi c. Membahas partisipasi masyarakat dalam hal pengembangan wisata d. Mendeskripsikan dampak ekonomi	a. Jika pada penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan bentuk partsipasi masyarakat secara umum, pada penelitian sekarang memfokuskan partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung c. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata

[50] Nurhayati M. Ahad & Suroso, Jurnal: *"Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Objek Wisata Watu Parunu di Desa Lainjanji Kabupaten Sumba Timur"* Vol. 1 No. 2 2017

		Kabupaten Karanganyar"	masyarakat dengan adanya wisata	
2.	Ariz Nisrina	"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Objek Wisata Dam Margotirto di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus"	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap partisipasi	a. Pada penelitian sekarang memfokuskan partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung c. Pada penelitian yang sekarang hanya memfokuskan pada pengembangan wisata saja d. Pada penelitian yang sekarang hanya mendeskripsikan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya wisata e. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata
3.	Rifqy Widayuni	"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus"	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendekripsikan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap partisipasi c. Membahas partisipasi masyarakat dalam hal pengembangan wisata	a. Memfokuskan partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung c. Pada penelitian yang sekarang hanya mendeskripsikan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya wisata d. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata e. Penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu jenis wisata saja yang ada di salah satu desa
4.	Yayang Septian Sari	"Partisipasi masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendeskripsikan partisipasi	a. Memfokuskan partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Mendekripsikan partisipasi masyarakat

		Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran"	masyarakat dengan adanya kegiatan pariwisata c. Mendeskripsikan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya wisata	dalam beberapa tahap partisipasi c. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung d. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata
5.	Aditya Agung Nugroho	"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembanga n Desa Wisata Studi: di Desa Wisata Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen"	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendeskripsikan bentuk serta faktor pendukung partisipasi masyarakat dengan adanya kegiatan pariwisata c. Memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata	a. Pada penelitian sekarang memfokuskan partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Mendekripsikan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap partisipasi c. Pada penelitian yang sekarang hanya mendeskripsikan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya wisata d. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata e. Penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu jenis wisata saja yang ada di salah satu desa
6.	Ahmad Nawawi	"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok Di Desa Kretek Parangtritis"	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam hal pengembangan wisata	a. Pada penelitian sekarang memfokuskan partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Mendekripsikan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap partisipasi c. Pada penelitian yang sekarang hanya mendeskripsikan dampak ekonomi masyarakat dengan adanya wisata d. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata
7.	Nikita Amalia VGA, Andriani	"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembanga	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	a. Fokus pada partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Partisipasi masyarakat

	Kusumawati, & Luchman Hakim	n Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga Di Desa Tulungrejo Kota Batu"	b. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat c. Mendeskripsikan dampak ekonomi masyarakat	dalam beberapa tahap partisipasi c. Faktor pendukung partisipasi d. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata e. Penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu jenis wisata saja yang ada di salah satu desa
8.	Nurhayati M. Ahad & Suroso	"Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Objek Wisata Watu Parunu di Desa Lainjanji Kabupaten Sumba Timur"	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif b. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat	a. Fokus pada partisipasi dari setiap elemen masyarakat yang terlibat b. Partisipasi masyarakat masyarakat dalam beberapa tahap partisipasi c. Faktor pendukung partisipasi d. Dampak ekonomi masyarakat e. Lokasi dan jenis wisata yang diteliti berbeda, jenis wisata ini merupakan wana wisata

D. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya kerangka pemikiran akan memudah kegiatan penelitian serta memperjelas akar pemikiran, sehingga tidak terjadi perluasan masalah yang menyebabkan ketidakfokusan peneliti.

Kegiatan pariwisata saat ini banyak sekali memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal pendapatan, kesempatan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Untuk mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi perlu adanya pengembangan wisata yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Didalam pengelolaan pariwisata juga memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung, karena merekalah yang tinggal disekitar objek wisata serta merekalah yang paling tahu dengan seluk beluk daerah setempat mereka tinggal. Dengan pengelolaan secara penuh diberikan pada masyarakat serta ada pengawasan dari desa setempat akan memberikan dampak yang positif

bagi masyarakat yang terlibat dalam segala tahap maupun bentuk partisipasi. Pariwisata berbasis masyarakat, maka masyarakat harus berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan wisata tersebut. Wisata Jurang Senggani merupakan salah satu wana wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dan sudah termasuk dalam salah satu wisata alam yang populer dikalangan para pecinta alam maupun penikmat rekreasi. Dengan adanya pandemi covid 19 yang saat ini melanda seluruh wilayah di belahan dunia tak luput juga wilayah Indonesia mau tak mau juga berpengaruh pada seluruh sektor perekonomian negara. Covid 19 juga memberikan dampak yang cukup besar di sektor pariwisata. Untuk saat ini kegiatan pariwisata untuk sementara waktu dihentikan. Namun kegiatan masyarakat untuk tetap menjaga fasilitas-fasilitas di area wisata guna mengembangkan wisata masih tetap dilakukan. Kontribusi seta kerjasama antar warga sekitar lokasi wisata juga diharapkan dapat terus terjalin dan ditingkatkan, jika sewaktu-waktu kegiatan pariwisata dibuka untuk umum maka wisatawan juga dapat menikmati fasilitas wisata dengan nyaman. Hal ini akan memberikan dampak perekonomian bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Tentunya pada masa sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid 19, partisipasi masyarakat juga berbeda dan juga dampak ekonomi yang mereka rasakan juga ikut berubah.

Berdasar paparan diatas, pada penelitian ini maka penulis memfokuskan kepada partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Jurang Senggani.
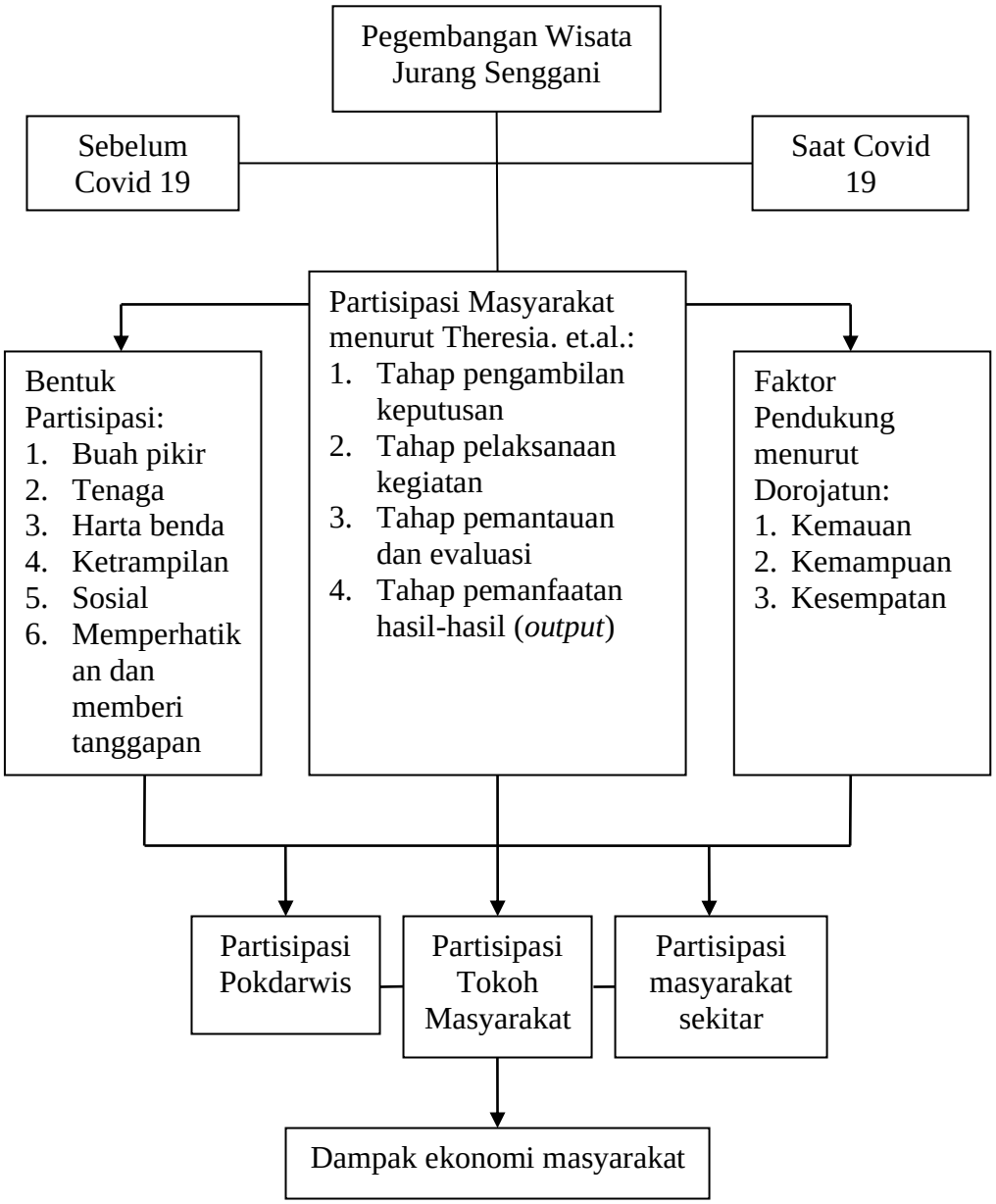
Bagan 2.1
Kerangka Berpikir